

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta:Jakarta.
- Ashsofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta:Jakarta.
- Basuki, Sulistyono, 2006, *Metode Penelitian*, Pustaka Sinar Harapan:Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. RajaGrafindo Persada:Jakarta.
- Dahlan, Hanafi. Dkk, 2004, *Uji Coba Pola Pemberdayaan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga*, Yogyakarta: Departemen Sosial RI.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Press Indo:Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri:Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni:Bandung.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center:Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta:Jakarta.
- Sadli, Saporinah, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang:Jakarta.
- Said, Ali. dkk, 2017, *Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Jakarta.
- Sastrawidjaja, Sofjan, 1990, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO:Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia:Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni:Bandung.

Surakhmad, Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar. Metode dan Teknik*, Tarsito: Bandung.

Suryawan, I Ngurah, 2010, *Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern: Bara Di Bali Utara*, Kencana:Jakarta.

Tamtiari, Wini, 2005, *Awig-Awig, Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?*, Yogyakarta:Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Tina, Dwia Aries. dkk, 2002, *Menggagas Tempat yang Aman Bagi Perempuan*, Yogyakarta:Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu: Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 180).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446).

C. Hasil Penelitian/Jurnal

Andina, Mia, 2014, “Kebijakan Penal Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus Kekerasan Seksual)”, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Kumdendong, Wempi JH, 2017, Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.23, No 9.

Ni'mah, Zulfatun, 2012, Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Mimbar Hukum*, Vol.24, No 1.

Pangaribuan, Hengki Charles, 2012, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Upaya Non Penal, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Sari, Aprilia Mila, 2009, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

D. Internet

Fitira, Eva, “Kekerasan Pada Perempuan Selama 2017 Didominasi KDRT dan Pelecehan”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3903861/kekerasan-pada-perempuan-selama-2017-didominasi-kdrt-dan-pelecehan>, pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 12.16

Gumilang, Akhtur, “Kota Semarang Tertinggi Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Jateng”, diakses dari <http://jateng.tribunnews.com/2017/12/07/kota->

semarang-tertinggi-jumlah-kasus-kekerasan-perempuan-di-jateng, pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 12.41.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya”, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>, pada tanggal 17 Januari 2019 pukul 11.23

Putri, Riani Sanusi, “Komnas Perempuan: KDRT Jadi Kasus Terbanyak pada Perempuan”, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyak-pada-perempuan/full&view=ok>, pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 10.18.